

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BIDANG
PEMANFAATAN KOTA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Pengajuan Skripsi



Oleh:

MARTINUS DANDIANTO REGHO

2018210084

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG**

2022

RINGKASAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Bidang Pemanfaatan Kota Malang. Wawancara, observasi dan dokumentasi dipakai sebagai teknik pengumpulan data. Adapun informan penelitian dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah sebagai informan kunci, 3 orang kasubid di antaranya adalah Kasubid Penggunausahaan Aset Daerah, Kasubid Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Daerah, Kasubid Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah sebagai informan pendukung. Model interaktif adalah teknik analisis data yang digunakan. Triangulasi teknik dilakukan untuk memeriksa keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah Bidang Pemanfaatan Kota Malang cukup akuntabel. Hal ini dapat dibuktikan dengan hampir dipenuhinya masing-masing dimensi di antaranya: (1) Kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan yang dapat dilihat dengan adanya SOP pada 2 dari ke-5 bentuk pemanfaatan pengelolaan BMD yakni sewa dan bangun serah guna, adanya mekanisme pertanggungjawaban, sistem pemantapan kinerja dan sistem pengawasan; (2) Penetapan sanksi atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan pejabat atau pegawai; dan (3) *Output* dan *outcome* yang dituangkan dan disatukan ke dalam Laporan Keuangan Tahunan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan BMD, Kota Malang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanggungjawaban adalah cara seseorang atau kelompok menunjukkan kesanggupan dalam membangun kepercayaan atasan. Pertanggungjawaban di dunia atau ranah publik dikenal dengan sebutan akuntabilitas. Dengan begitu padatnya arti pertanggungjawaban pada kata akuntabilitas membuatnya menjadi begitu penting untuk disisipkan ke dalam setiap bentuk perkumpulan. Pertanggungjawaban membawa kita untuk bekerja yang rapih dan berkeinginan pada hasil yang baik.

Sedangkan jika menata suatu benda, hal atau pekerjaan disebut pengelolaan. Mengelola aset kepunyaan daerah perlu ada tanggung jawab. Aset daerah yang dikelola punya manfaat dan menjadi penting. Nilai manfaat memberi akibat pada penghasilan daerah yang bertambah. Aset kepunyaan daerah menolong semua pekerjaan menjadi lancar. Karenanya, harus ditata dan ikut pada aturan yang dibikin. Benda atau aset daerah dapat dikelola dengan cara pemanfaatan sehingga tidak ada kesan nganggur dan aset yang dikelola akan jauh lebih produktif.

MalangTimes.com (09/11/21) menyebut ada 8200 aset di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Malang. Ini adalah jumlah yang sangat banyak dan perlu ditata dan dikelola secara bertanggungjawab. Jika barang tersebut dikelola didasarkan atas rasa tanggung jawab maka berakibat pada jalannya pemanfaatan yang baik. Tanggung jawab dalam mengelola aset memberi garansi positif pada pemakaian sumber daya yang lebih teratur dan jujur.

Tetapi hal yang dilihat di lapangan sungguhlah menyedihkan. Laporan MCW mengatakan bahwa di tahun 2016 dan 2017 ada aset seperti jalan dan irigasi yang belum didata. Hasil pengawasan BPK juga menyebut bahwa di tahun 2014 ada 56 kendaraan milik dinas yang diperkirakan hilang dan tidak dibukukan. Masing-masing kerugian berkisar Rp. 5 triliun dan 7,4 miliar.

Dengan melihat permasalahan tadi, pemerintah Kota Malang perlulah mengatur dan menata dalam hal pengelolaan aset daerah dengan lebih bijak dan akuntabel. Setiap aset mesti dibukukan secara rapi dan teratur supaya tidak ada yang tercecer atau bahkan hilang. Perawatan pada setiap aset juga perlu agar pemanfaatan dapat lebih berkelanjutan dan jangka panjang.

Pertanggungjawaban yang hidup pada kelompok atau organisasi publik daerah dapat memberi akibat pada sehatnya kelompok itu sendiri. Sebagai contoh di Kota Malang, pemerintah tak butuh membuang banyak uang untuk pengadaan aset tetapi cukup dengan merawat barang daerah yang ada. Masyarakat yang tinggal di Kota Malang juga bisa rasakan manfaat yang sama. Paling tidak jatah dana kelola bisa dialirkan pada hal kesejahteraan warga. Dalam hal ini daerah menjadi mandiri dalam mengurus urusannya sendiri. Ini juga memberikan akibat positif kepada negara. Setidaknya negara tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk menolong permasalahan di daerah dan defisit keuangan tidak terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, sehingga bisa diformulasikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Bidang Pemanfaatan Kota Malang?
2. Apa Sajakah faktor penghambat dan pendukung dalam akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan BMD Bidang Pemanfaatan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diformulasikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Bidang Pemanfaatan Kota Malang.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan BMD Bidang Pemanfaatan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka harapannya penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan studi dalam melengkapi kajian-kajian bagi para peneliti di masa mendatang serta memperkaya khazanah di bidang ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memperluas cakrawala peneliti serta menjadi amunisi yang baik dalam mempersiapkan diri untuk terjun ke dalam dunia birokrasi dan masyarakat.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah bidang pemanfaatan yang lebih baik kedepannya.

c. Bagi Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Untuk memperkaya koleksi kepustakaan serta menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa Prodi Administrasi Publik khususnya dan mahasiswa Universitas Tribhuwana Tunggadewi umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, Dwi dan Taufik Kurrohman. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember*. Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan, Vol. 2, No. 3, hlm 473-485
- Bandur, Agustinus. 2014. *Penelitian Kualitatif, Metodologi, Desain dan Teknik Analisis Data Dengan Nvivo 10*. Bogor: Mitra Wacana Media
- Dokumen Pemerintah Daerah. 2022. Perjanjian Kinerja. Malang: (malangkot.go.id) diakses pada 02 Juni 2022
- Hanifah, Suci dan Sugeng Praptoyo. 2015. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)*. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Vol. 4, No. 8, hlm 1-15
- Harahap, Rudy. 2013. *Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik, Konsep, Praktik, Studi Kasus, Topik Lanjutan*. Jakarta: Pusat Informasi Pengawasan BPKP
- Jatimbpk. 2018. Nilai Capai Rp 5 Triliun, Sutiaji-Sofyan Edi Didesak Selesaikan Aset Bermasalah Di Kota Malang. (<https://jatim.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/01/catber-aset.pdf>) diakses pada 01 Februari 2022.
- KBBI. 2022. Kamus Versi Online. (<https://kbbi.web.id/>) diakses pada 27 Mei 2022)
- Kudsi, dkk. 2017. *Pengaruh Pengembangan Karir dan Sistem Insentif Terhadap Kinerja Karyawan*. Jurnal Manajemen, Vol. 9, No. 2, hlm. 85-93
- Malangtimes. 2021. Pemkot Malang Tata Aturan Aset, Dari Izin Pemakaian Jadi Sewa. (<https://tinyurl.com/MalangTimes>) diakses pada 01 Februari 2022.
- Moleong, Lexy. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nafidah, Lina dan Mawar Suryaningtyas. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 1, hlm. 213-239.

- Nurhayati, Neni, dkk. 2021. *“Faktor-Faktor Pendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi, Vol. 7, No. 2, hlm. 215-234
- Peraturan Daerah Kota Malang No. 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2020 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
- Peraturan Walikota Malang No. 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah
- Peraturan Walikota Malang No. 36 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Bagi Pejabat Atau Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang Atau Pengguna Barang
- Peraturan Walikota Malang No. 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- Raba, Manggaukang. 2020. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang: UMM Press
- Remus, Sahat. 2017. *Analisis Sistem Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Mandiri Cabang Krakatau Medan*. Jurnal Ilmiah Methonomi, Vol. 3, No. 2, hlm. 26-35
- Setiana dan Yuliani. 2017. *Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, Vol. 1, No. 2, hlm 205-210
- Solihin, Dadang. 2007. *Indikator Governance dan Penerapannya Dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia*. Bandung: BAPPENAS
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- Suhartini. 2019. *Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara*. Jurnal de Jure, Vol. 11, No. 2, hlm 1-16
- Sukmawati, Fitri dan Alfi Nurfitriani. 2019. *Pengaruh Transaransi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut)*. Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM, Vol. 2, No. 1, hlm 52-66.
- Wicaksono, Kristian. 2015. *Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik*. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik, Vol. 19, No. 1, hlm 17-26.